

## Table Of Content

<b>Journal Cover</b>	2
<b>Author[s] Statement</b>	3
<b>Editorial Team</b>	4
<b>Article information</b>	5
Check this article update (crossmark)	5
Check this article impact	5
Cite this article	5
<b>Title page</b>	6
Article Title	6
Author information	6
Abstract	6
<b>Article content</b>	8

---

# Academia Open



*By Universitas Muhammadiyah Sidoarjo*

---

## Originality Statement

The author[s] declare that this article is their own work and to the best of their knowledge it contains no materials previously published or written by another person, or substantial proportions of material which have been accepted for the published of any other published materials, except where due acknowledgement is made in the article. Any contribution made to the research by others, with whom author[s] have work, is explicitly acknowledged in the article.

## Conflict of Interest Statement

The author[s] declare that this article was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

## Copyright Statement

Copyright © Author(s). This article is published under the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) licence. Anyone may reproduce, distribute, translate and create derivative works of this article (for both commercial and non-commercial purposes), subject to full attribution to the original publication and authors. The full terms of this licence may be seen at <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode>

## EDITORIAL TEAM

### Editor in Chief

Mochammad Tanzil Multazam, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

### Managing Editor

Bobur Sobirov, Samarkand Institute of Economics and Service, Uzbekistan

### Editors

Fika Megawati, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Mahardika Darmawan Kusuma Wardana, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Wiwit Wahyu Wijayanti, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Farkhod Abdurakhmonov, Silk Road International Tourism University, Uzbekistan

Dr. Hindarto, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Evi Rinata, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

M Faisal Amir, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Dr. Hana Catur Wahyuni, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Complete list of editorial team ([link](#))

Complete list of indexing services for this journal ([link](#))

How to submit to this journal ([link](#))

# Academia Open

Vol 10 No 2 (2025): December

DOI: 10.21070/acopen.10.2025.11755 . Article type: (Business and Economics)

## Article information

**Check this article update (crossmark)**



**Check this article impact (\*)**



**Save this article to Mendeley**



(\*) Time for indexing process is various, depends on indexing database platform

## **Village Funds, Capital Expenditures, and Tax Sharing in Infrastructure Development**

### *Dana Desa, Belanja Modal, dan Pembagian Pajak dalam Pembangunan Infrastruktur*

**Timbul Sujatmoko, [Timbul.sujatmoko@gmail.com](mailto:Timbul.sujatmoko@gmail.com), (1)**

*Program Studi Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Jember, Indonesia*

**Riyanto Setiawan Suharsono, [riyantosetiawan@unmuhjember.ac.id](mailto:riyantosetiawan@unmuhjember.ac.id), (0)**

*Program Studi Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Jember, Indonesia*

**Abadi Sanosra, [abadi@unmuhjember.ac.id](mailto:abadi@unmuhjember.ac.id), (0)**

*Program Studi Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Jember, Indonesia*

<sup>(1)</sup> Corresponding author

#### **Abstract**

**General Background:** Village infrastructure development is pivotal in enhancing community welfare and accelerating regional growth. **Specific Background:** In Indonesia, funding from Village Funds, Capital Expenditures, and Tax Revenue Sharing serves as a primary driver for such development. **Knowledge Gap:** However, limited empirical evidence exists on how these funding sources collectively influence infrastructure outcomes, particularly when mediated by retribution mechanisms. **Aims:** This study investigates the direct and indirect effects of Village Funds, Capital Expenditures, and Tax Revenue Sharing on infrastructure development in Gading District, with retribution as an intervening variable. **Results:** Using a quantitative approach through surveys and questionnaires in selected villages, the findings reveal that all three funding sources have a positive and significant impact on infrastructure development, while retribution strengthens these relationships. **Novelty:** This research integrates retribution as a mediating factor, providing a nuanced understanding of financial flows in village-level development. **Implications:** The study underscores the need for transparent, accountable fund management and enhanced community participation in tax and retribution payments, offering actionable recommendations for strengthening village financial capacity to achieve sustainable infrastructure and welfare improvements.

#### **Highlights:**

- Funding sources significantly boost infrastructure growth.
- Retribution strengthens funding-development links.
- Transparent management enhances community welfare.

**Keywords:** Village Funds, Capital Expenditures, Tax Revenue Sharing, Infrastructure Development, Retribution Mechanism

# Academia Open

Vol 10 No 2 (2025): December

DOI: 10.21070/acopen.10.2025.11755 . Article type: (Business and Economics)

Published date: 2025-08-11 00:00:00

---

## Pendahuluan

Pembangunan desa menjadi salah satu prioritas utama dalam upaya pemerintah Indonesia untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan mempercepat pengentasan kemiskinan di seluruh wilayah. Desa tidak hanya berfungsi sebagai unit administratif terkecil, tetapi juga sebagai pusat pemberdayaan masyarakat yang memiliki peran strategis dalam menggerakkan pembangunan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Dengan memberdayakan desa, diharapkan dapat tercipta pembangunan yang inklusif dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nyata melalui peningkatan akses terhadap sarana dan prasarana dasar, pengembangan potensi lokal, serta penguatan kapasitas pemerintahan desa dalam mengelola sumber daya secara efektif dan transparan. Oleh karena itu, fokus pada pembangunan desa menjadi langkah penting dalam mendukung tujuan pembangunan nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Pembangunan infrastruktur desa bukan sekadar pembangunan fisik semata, melainkan fondasi utama yang menopang pertumbuhan ekonomi dan sosial di tingkat desa [1]. Banyak desa masih menghadapi keterbatasan akses terhadap fasilitas dasar seperti jalan yang memadai, air bersih, dan irigasi, yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat [2]. Keterbatasan infrastruktur ini menghambat mobilitas, memperlambat laju produksi pertanian, dan membatasi akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan pasar. Oleh karena itu, percepatan dan peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur desa menjadi sangat krusial untuk menutup kesenjangan pembangunan antarwilayah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa secara menyeluruh.

Pembangunan desa merupakan salah satu aspek penting dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Desa sebagai unit terkecil dalam sistem pemerintahan di Indonesia memiliki peranan strategis dalam menopang pembangunan nasional, khususnya dalam konteks pengurangan kesenjangan sosial, percepatan pemerataan pembangunan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat desa [3]. Salah satu bentuk nyata dari pembangunan desa adalah pembangunan infrastruktur, yang mencakup jalan desa, jembatan, fasilitas air bersih, sanitasi, irigasi pertanian, dan sarana pelayanan publik lainnya [4]. Menurut [5] Infrastruktur yang memadai akan mendorong peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat, memperlancar mobilitas barang dan jasa, serta memperkuat konektivitas antarwilayah di tingkat lokal. Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberikan kewenangan kepada desa untuk mengelola dan mengatur urusan pemerintahannya sendiri, termasuk dalam aspek keuangan. Salah satu bentuk dukungan nyata dari pemerintah pusat terhadap kemandirian desa adalah melalui penyaluran Dana Desa, yang dialokasikan setiap tahun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan kemasyarakatan desa. Dengan adanya Dana Desa, diharapkan pemerintah desa mampu meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur secara partisipatif dan berkelanjutan.

Selain Dana Desa, komponen Belanja Modal dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) juga memiliki kontribusi signifikan dalam mendukung pembangunan infrastruktur. Belanja Modal diarahkan untuk pengadaan, pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan aset tetap desa yang memiliki manfaat jangka panjang. Pengelolaan Belanja Modal yang efektif dan efisien akan sangat menentukan kualitas dan keberlanjutan infrastruktur desa yang dibangun. Oleh karena itu, perencanaan dan pelaksanaan Belanja Modal perlu mendapat perhatian khusus, baik dari segi transparansi, akuntabilitas, maupun partisipasi masyarakat. [6] dalam penelitiannya menjelaskan bahwa dalam konteks desentralisasi fiskal, Dana Desa diharapkan tidak hanya menjadi instrumen keuangan, tetapi juga alat untuk memperkuat kapasitas pemerintahan desa dalam mengelola pembangunan. Alokasi Dana Desa (ADD) dan Belanja Modal merupakan dua komponen yang sangat penting dalam proses pembangunan infrastruktur. ADD memberikan ruang fiskal bagi desa untuk membiayai program prioritas, sedangkan belanja modal mencerminkan investasi jangka panjang dalam aset tetap desa [7]. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa alokasi Belanja Modal yang optimal langsung meningkatkan kualitas infrastruktur desa, sementara pengelolaan yang transparan dan partisipatif memperkuat kepercayaan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan. Dengan demikian, Belanja Modal berperan penting sebagai investasi fisik dan strategi pembangunan desa yang berkelanjutan.

Di samping itu, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada desa juga menjadi salah satu sumber pendapatan desa yang dapat digunakan untuk mendanai kegiatan pembangunan. Bagi Hasil Pajak merupakan bentuk desentralisasi fiskal yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas fiskal desa dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan, termasuk infrastruktur. Meskipun nilainya relatif kecil dibandingkan Dana Desa, namun secara akumulatif, Bagi Hasil Pajak berperan dalam memperkuat daya dukung anggaran pembangunan desa. Menurut [8] Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah juga memiliki peran dalam mendukung pembangunan desa. Pajak dan retribusi yang dibagihasilkan kepada desa seharusnya dapat menambah kapasitas fiskal desa dalam menyediakan layanan publik dan membiayai pembangunan infrastruktur. Namun, efektivitas kontribusi tersebut sangat tergantung pada kemampuan pemerintah desa dalam mengelola dan mengalokasikan sumber daya secara efisien [9]. Dalam hal ini, retribusi dapat dilihat sebagai variabel intervening yang menghubungkan kebijakan fiskal dengan pembangunan infrastruktur secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, bagi hasil pajak yang diterima desa juga mempengaruhi kapasitas fiskal desa dalam mendanai berbagai proyek pembangunan, termasuk pembangunan infrastruktur. Namun, pengelolaan sumber daya desa yang terbatas sering kali menjadi kendala dalam optimalisasi pajak yang dapat diperoleh. Salah satu aspek yang perlu dipertimbangkan adalah peran retribusi yang dapat berfungsi sebagai sumber pendapatan tambahan untuk mendanai pembangunan infrastruktur. Penelitian menunjukkan bahwa Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah penting untuk meningkatkan kapasitas fiskal desa dan pembangunan infrastruktur [6]. Efektivitasnya tergantung pada tata kelola keuangan desa dan partisipasi masyarakat [10], sehingga optimalisasi keduanya krusial untuk keberlanjutan pembangunan desa.

Pembangunan infrastruktur di desa menjadi salah satu prioritas strategis dalam agenda pembangunan nasional [11] Pemerintah Indonesia telah mengalokasikan Dana Desa sebagai instrumen fiskal untuk mendorong percepatan pembangunan di tingkat lokal, terutama dalam penyediaan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, irigasi, sarana air bersih, dan fasilitas publik lainnya. Infrastruktur yang memadai diyakini mampu meningkatkan konektivitas antar wilayah, mendukung aktivitas ekonomi, serta memperbaiki kualitas hidup masyarakat desa [12]. Di sisi lain, keberhasilan pembangunan infrastruktur desa tidak hanya bergantung pada alokasi dana dari pemerintah pusat maupun daerah, tetapi juga pada partisipasi aktif masyarakat desa, salah satunya melalui kontribusi dalam bentuk retribusi. Retribusi merupakan pungutan yang dikenakan kepada masyarakat atas pemanfaatan fasilitas atau jasa layanan publik yang disediakan oleh pemerintah desa. Retribusi yang dikelola dengan baik dapat menjadi sumber pendapatan asli desa yang berpotensi mendukung pembiayaan pembangunan infrastruktur secara berkelanjutan [13]. Pembangunan infrastruktur desa merupakan prioritas nasional dengan dukungan Dana Desa sebagai instrumen fiskal untuk menyediakan fasilitas dasar seperti jalan dan air bersih [11]. Keberhasilan pembangunan juga bergantung pada partisipasi masyarakat melalui retribusi, yang menjadi sumber pendapatan asli desa dan mencerminkan keterlibatan masyarakat dalam menjaga dan memelihara fasilitas desa [13].

Namun, dalam proses tersebut, Retribusi sebagai variabel intervening memegang peranan yang sangat penting dalam proses pembangunan infrastruktur desa karena berfungsi sebagai sumber pendapatan tambahan yang dapat memperkuat kemampuan keuangan desa. [14] Retribusi yang diperoleh dari berbagai jasa dan pelayanan yang disediakan oleh desa, seperti retribusi izin tertentu, retribusi pasar, dan retribusi layanan publik lainnya, berkontribusi langsung terhadap peningkatan pendapatan asli desa yang bersifat mandiri dan berkelanjutan. Dengan adanya pendapatan dari retribusi, desa memiliki fleksibilitas lebih besar dalam mengalokasikan belanja modal dan mendukung pembangunan infrastruktur secara lebih optimal. Menurut [15] Retribusi berperan penting dalam membiayai proyek infrastruktur dan layanan publik desa. Pengelolaan retribusi yang tepat waktu, transparan, dan akuntabel menjamin kelancaran pembangunan, meningkatkan kualitas hidup, serta memperkuat kepercayaan dan partisipasi masyarakat. Penelitian [16] menunjukkan bahwa retribusi penting dalam meningkatkan kapasitas fiskal desa dan pembiayaan infrastruktur, dengan pengelolaan yang transparan meningkatkan partisipasi masyarakat dan tata kelola pembangunan desa.

Terdapat kesenjangan penelitian terdahulu [17], Dana Desa secara umum berpengaruh signifikan positif terhadap pembangunan infrastruktur desa. Studi lain di Indonesia (2015-2018) juga mengonfirmasi dampak positif Dana Desa terhadap infrastruktur desa secara luas. [18] menyatakan Belanja Modal daerah juga terbukti berpengaruh signifikan mempercepat pembangunan infrastruktur dan mendukung pertumbuhan

ekonomi wilayah. Meski demikian, dalam konteks distribusi pembangunan yang tidak merata dan prioritas berbeda antar daerah, pengaruh belanja modal bisa kurang optimal dan tidak selalu signifikan. Dana Bagi Hasil Pajak yang diterima daerah memberikan pengaruh positif signifikan terhadap pembangunan infrastruktur melalui peningkatan belanja modal daerah [19]. Namun, pengaruh ini juga dapat bervariasi tergantung periode dan wilayah, sehingga dalam beberapa kasus pengaruhnya. Kesenjangan penelitian menunjukkan bahwa pengaruh Dana Desa, Belanja Modal, dan Bagi Hasil Pajak terhadap pembangunan infrastruktur bersifat kontekstual, dipengaruhi oleh waktu, pengelolaan dana, dan kondisi daerah [20]. Meskipun ada bukti pengaruh signifikan, beberapa hasil juga menunjukkan pengaruh tidak signifikan terutama dalam jangka pendek atau tanpa mempertimbangkan variabel pendukung.

Kecamatan Gading merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, Indonesia, dengan ibu kota kecamatan berada di Desa Wangkal. Kecamatan ini terdiri dari 19 desa, antara lain Wangkal, Gading Wetan, Sentul, Batur, Betektaman, Bulupandak, Dandang, Duren, Jurangjero, Kaliancar, Keben, Mojolegi, Nogosaren, Prasi, Ranuwurung, Renteng, Sumbersecang, Kertosono, dan Condong. Desa Wangkal sebagai pusat pemerintahan kecamatan memiliki luas sekitar 6,51 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk sekitar 8.072 jiwa dan kepadatan penduduk sekitar 1.164 jiwa per km<sup>2</sup>. Kecamatan Gading secara umum memiliki karakteristik wilayah yang terdiri dari desa-desa dengan luas bervariasi dan penduduk yang sebagian besar bermata pencaharian di sektor pertanian dan usaha mikro. Dari sisi sosial ekonomi, Kecamatan Gading menunjukkan pertumbuhan ekonomi sekitar 4,7-4,8% dengan persentase penduduk miskin sekitar 16-17% dan tingkat pengangguran terbuka sekitar 3%. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di kecamatan ini berada di kisaran 70,3 hingga 70,8, yang mencerminkan kondisi kualitas hidup masyarakat yang sedang berkembang.

Secara administratif dan pemerintahan, kecamatan ini dipimpin oleh seorang camat dan memiliki struktur pemerintahan yang mengelola berbagai pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur desa. Kecamatan Gading berperan penting dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Probolinggo, khususnya dalam pengelolaan dana desa, belanja modal, dan sumber pendapatan lain seperti bagi hasil pajak dan retribusi yang mendukung pembangunan infrastruktur desa di wilayahnya [21].

Oleh karena itu, dalam konteks penelitian ini yang berfokus pada Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo, sangat penting untuk menganalisis bagaimana retribusi berperan sebagai variabel intervening yang memediasi hubungan antara Dana Desa, belanja modal, dan bagi hasil pajak terhadap pembangunan infrastruktur desa. Kecamatan Gading, dengan berbagai desa yang memiliki karakteristik sosial ekonomi dan pengelolaan keuangan yang berbeda-beda, menjadi lokasi yang tepat untuk memahami mekanisme pendanaan desa secara nyata. Pengelolaan retribusi di desa-desa di Kecamatan Gading dapat memberikan gambaran bagaimana pendapatan asli desa ini dapat memperkuat penggunaan Dana Desa, belanja modal, dan bagi hasil pajak dalam membiayai pembangunan infrastruktur. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan bagaimana optimalisasi pengelolaan retribusi di Kecamatan Gading mampu meningkatkan efektivitas pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat desa di wilayah tersebut.

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus analisis pengaruh Dana Desa, Belanja Modal, dan Bagi Hasil Pajak terhadap pembangunan infrastruktur desa yang dilihat secara kontekstual di Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo. Penelitian terdahulu telah menunjukkan bahwa ketiga sumber pendanaan tersebut memiliki dampak positif secara umum terhadap pembangunan infrastruktur desa [17].

Penelitian ini menawarkan kontribusi baru dengan memasukkan peran retribusi sebagai variabel intervening yang memediasi hubungan antara Dana Desa, Belanja Modal, dan Bagi Hasil Pajak terhadap pembangunan infrastruktur. Dengan menempatkan Kecamatan Gading yang memiliki keragaman karakteristik sosial ekonomi dan pengelolaan keuangan desa sebagai studi kasus, penelitian ini mampu mengungkap mekanisme nyata optimalisasi sumber dana desa dalam konteks lokal. Hal ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana pengelolaan retribusi dan pendapatan asli desa dapat memperkuat dan meningkatkan efektivitas penggunaan Dana Desa dan sumber dana lain dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat desa. Pendekatan ini belum banyak diangkat dalam penelitian sebelumnya, sehingga memberikan nilai tambah dan kebaruan bagi kajian pembangunan desa di Indonesia. Hal ini menimbulkan pertanyaan penelitian:

1. Apakah retribusi benar-benar berperan sebagai penghubung (mediator) yang signifikan antara Dana Desa, Belanja Modal, dan Bagi Hasil Pajak dengan pembangunan infrastruktur desa?
2. Sejauh mana kekuatan mediasi retribusi berbeda pada konteks wilayah dengan karakteristik sosial ekonomi yang beragam, seperti Kecamatan Gading di Kabupaten Probolinggo?
3. Bagaimana mekanisme pengelolaan retribusi dapat dioptimalkan untuk memaksimalkan dampak positif sumber-sumber pendanaan terhadap pembangunan infrastruktur desa?

Dengan merumuskan pertanyaan-pertanyaan ini, penelitian dapat lebih jelas menunjukkan kontribusinya dalam mengisi celah (gap) literatur yang belum banyak dibahas, khususnya pada konteks lokal yang spesifik.

## Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Menurut [22] penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara lain dari kuantitatif. Selain itu penelitian ini Pengaruh Dana Desa, Belanja Modal, Dan Bagi Hasil Pajak Terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa Dengan Retribusi Sebagai Variabel Intervening (Studi Di Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo). Populasi juga disebut *universum (universe)* yang berarti keseluruhan, dapat berupa benda hidup atau benda mati. Maka berdasarkan uraian tersebut, populasi pada penelitian ini yakni perangkat desa-desa di kecamatan Gading, Sampel yang diambil dari populasi yakni *proportional sampling* adalah peneliti mengambil wakil-wakil dari tiap-tiap kelompok yang ada dalam populasi yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah anggota subjek yang ada di dalam masing-masing kelompok [23], dalam penelitian ini yaitu desa-desa di kecamatan gading. Teknik dalam pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive proportional random sampling*. Purposive sampling menurut Sugiyono adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu [24]. Dalam penelitian ini, untuk menguji hipotesis, penelitian menggunakan *Structural Equation Modeling (SEM)* dengan alat statistik *WarptPLS*. Pemodelan Persamaan Struktural (*SEM*) adalah pendekatan terintegrasi antara analisis faktor, model struktural, dan analisis jalur. Definisi Operasional Variabel dan Instrumen Penelitian

### 1. Dana Desa (X1)

- a. Definisi Operasional: Dana yang bersumber dari APBN untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- b. Indikator: Ketepatan waktu penyaluran, tingkat penyerapan anggaran, kesesuaian penggunaan, transparansi pelaporan, partisipasi masyarakat.
- c. Contoh Butir Kuesioner: 'Dana Desa disalurkan tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan.' (Skala Likert 1–5)

### 2. Belanja Modal (X2)

- a. Definisi Operasional: Pengeluaran anggaran desa untuk pengadaan, pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan aset tetap.
- b. Indikator: Proporsi belanja modal, kualitas perencanaan, kesesuaian kebutuhan, kualitas hasil, efisiensi anggaran.
- c. Contoh Butir Kuesioner: 'Belanja modal desa difokuskan pada proyek infrastruktur yang sesuai kebutuhan masyarakat.'

### 3. Bagi Hasil Pajak (X3)

- a. Definisi Operasional: Penerimaan desa dari kabupaten/kota yang berasal dari pajak daerah.
- b. Indikator: Ketepatan jumlah, ketepatan waktu, pemanfaatan, pencatatan, transparansi.
- c. Contoh Butir Kuesioner: 'Bagi hasil pajak dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur desa.'

**4. Retribusi (Z)**

- a. Definisi Operasional: Pungutan atas penggunaan fasilitas/jasa publik yang dikelola desa.
- b. Indikator: Jenis retribusi, kepatuhan pembayaran, efektivitas pengelolaan, keterlibatan masyarakat, pemanfaatan hasil.
- c. Contoh Butir Kuesioner: 'Pendapatan dari retribusi desa digunakan untuk memperbaiki atau membangun fasilitas umum.'

**5. Pembangunan Infrastruktur Desa (Y)**

- a. Definisi Operasional: Peningkatan ketersediaan, kualitas, dan aksesibilitas sarana/prasarana dasar desa.
- b. Indikator: Kondisi jalan, sarana air bersih, fasilitas publik, akses transportasi, kepuasan masyarakat.
- c. Contoh Butir Kuesioner: 'Kondisi jalan desa memudahkan masyarakat mengakses pusat ekonomi dan pelayanan publik.'

**Hasil dan Pembahasan**

**A. Uji Validitas**

Kriteria uji validitas adalah dengan menggunakan kriteria faktor loading (*cross loadings factor*) dengan nilai lebih dari 0,70 dan *average variance extracted* (AVE) dengan nilai melebihi 0,50 untuk uji *convergent validity* dan *discriminant validity* menggunakan perbandingan akar dari AVE dengan korelasi antar variabel. Nilai AVE konstruk seharusnya lebih tinggi dibandingkan dengan korelasi antar variabel. Nilai AVE konstruk seharusnya lebih tinggi dibandingkan dengan korelasi antar variabel laten [25]. Hasil WarpPLS 8.0 dapat dilihat pada tabel 1 sebagai berikut

	X1	X2	X3	Z	Y	Type(a	SE	P value
X1.1	<b>(0.781)</b>	0.077	-0.182	-0.131	-0.379	Reflective	0.083	<0.001
X1.2	<b>(0.897)</b>	0.339	-0.125	-0.056	-0.105	Reflective	0.08	<0.001
X1.3	<b>(0.897)</b>	0.211	-0.112	0.117	0.071	Reflective	0.08	<0.001
X1.4	<b>(0.833)</b>	-0.443	0.294	0.111	0.112	Reflective	0.081	<0.001
X1.5	<b>(0.888)</b>	-0.208	0.123	-0.051	0.263	Reflective	0.08	<0.001
X2.1	0.240	<b>(0.908)</b>	0.368	0.031	-0.135	Reflective	0.08	<0.001
X2.2	-0.170	<b>(0.911)</b>	-0.338	0.005	0.019	Reflective	0.08	<0.001
X2.3	-0.268	<b>(0.905)</b>	0.068	-0.034	-0.055	Reflective	0.08	<0.001
X2.4	-0.161	<b>(0.888)</b>	-0.144	-0.034	0.166	Reflective	0.08	<0.001
X2.5	0.365	<b>(0.880)</b>	0.045	0.032	0.009	Reflective	0.08	<0.001
X3.1	0.042	0.144	<b>(0.887)</b>	-0.004	-0.046	Reflective	0.08	<0.001
X3.2	0.129	-0.082	<b>(0.891)</b>	0.035	-0.077	Reflective	0.08	<0.001
X3.3	-0.258	-0.051	<b>(0.849)</b>	-0.083	-0.145	Reflective	0.081	<0.001
X3.4	0.116	0.122	<b>(0.926)</b>	0.045	-0.030	Reflective	0.079	<0.001
X3.5	-0.045	-0.138	<b>(0.905)</b>	0.002	0.288	Reflective	0.08	<0.001
Z1	0.203	-0.449	0.913	<b>(0.912)</b>	0.146	Reflective	0.097	<0.001
Z2	0.332	0.005	-0.566	<b>(0.741)</b>	0.220	Reflective	0.083	<0.001
Z3	-0.970	1.893	-1.311	<b>(0.831)</b>	0.077	Reflective	0.091	<0.001
Z4	-0.131	-0.038	0.043	<b>(0.809)</b>	0.081	Reflective	0.082	<0.001
Z5	0.296	-0.877	0.956	<b>(0.790)</b>	-0.371	Reflective	0.082	<0.001
Y1	0.225	-0.198	0.028	-0.025	<b>(0.908)</b>	Reflective	0.08	<0.001

Y2	-0.013	0.192	-0.096	0.020	<b>(0.880)</b>	Reflective	0.08	<0.001
Y3	-0.078	-0.018	0.248	0.094	<b>(0.912)</b>	Reflective	0.08	<0.001
Y4	0.151	0.013	0.127	-0.102	<b>(0.880)</b>	Reflective	0.08	<0.001
Y5	-0.306	0.019	-0.333	0.011	<b>(0.836)</b>	Reflective	0.081	<0.001

Tabel 1. Combined loadings and cross-loadings

Kriteria faktor *cross-loadings* dengan nilai lebih dari 0,70 dikatakan tinggi, sedangkan nilai 0,50 – 0,60 dapat dianggap cukup. Pada hasil perhitungan WarpPLS 8.0 pada tabel 1. di atas menunjukkan bahwa Nilai *cross-loadings* di atas 0,70 dianggap tinggi dan 0,50–0,60 cukup. Hasil WarpPLS 8.0 menunjukkan semua nilai *cross-loadings* di atas 0,50 dengan signifikansi  $p < 0,001$ , menandakan faktor-faktor tersebut secara signifikan memengaruhi variabel terkait dan memenuhi kriteria validitas konvergen dengan baik.

**B. Uji Reliabilitas**

Dasar yang digunakan dalam uji reabilitas adalah nilai *Composite reability coefficient* dan *Cronbach's alpha coefficients* di atas 0,7. Hasil pada tabel 2. menunjukkan bahwa instrument juesioner dalam penelitian ini telah memenuhi ketentuan uji reabilitas.

<b>Composite reliability coefficients</b>				
-----				
X1	X2	X3	Z	Y
0.934	0.954	0.951	0.751	0.947
<b>Cronbach's alpha coefficients</b>				
-----				
X1	X2	X3	Z	Y
0.911	0.940	0.936	0.592	0.930

Tabel 2. Uji Reliabilitas

**C. Perhitungan Koefisien Jalur Pengaruh Langsung**

Hasil pada Tabel 3. merupakan hasil analisis PLS yang selanjutnya akan diinterpretasikan guna menjawab hipotesis yang diajukan. Adapun penjelasan hasil uji hiopotesis dapat dinyatakan sebagai berikut:

- a. Pengaruh manajemen dana desa (X1) terhadap retribusi (Z) menghasilkan nilai *path coefficient* sebesar 0,455 dengan nilai *p-value* sebesar 0,003. Karena *p-value* lebih rendah daripada tingkat signifikansi  $\alpha$  ( $0,003 < 0,05$ ) Oleh karena itu, berdasarkan hasil yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh.
- b. Pengaruh belanja modal (X2) terhadap retribusi (Z) menghasilkan nilai *path coefficient* sebesar 0,293 dengan nilai *p-value* sebesar 0,001. Karena *p-value* lebih rendah daripada tingkat signifikansi  $\alpha$  ( $0,001 < 0,05$ ) Oleh karena itu, berdasarkan hasil yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh.
- c. Pengaruh bagi hasil pajak (X3) terhadap citra sekolah (Z) menghasilkan nilai *path coefficient* sebesar 0,567 dengan nilai *p-value* sebesar  $<0,004$ . Karena *p-value* lebih rendah daripada tingkat signifikansi  $\alpha$  ( $0,004 < 0,05$ ) Oleh karena itu, berdasarkan hasil yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh.
- d. Pengaruh dana desa (X1) terhadap infarstruktur desa (Y) menghasilkan nilai *path coefficient* sebesar 0,268 dengan nilai *p-value* sebesar 0,003. Karena *p-value* lebih rendah daripada tingkat signifikansi  $\alpha$  ( $0,003 < 0,05$ ) Oleh karena itu, berdasarkan hasil yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh.

- e. Pengaruh belanja modal (X2) terhadap citra infrastruktur desa (Y) menghasilkan nilai *path coefficient* sebesar 0,405 dengan nilai *p-value* sebesar 0,001. Karena *p-value* lebih rendah daripada tingkat signifikansi  $\alpha$  ( $0,001 < 0,05$ ) Oleh karena itu, berdasarkan hasil yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh.
- f. Pengaruh bagi hasil pajak (X3) terhadap infrastruktur desa (Y) menghasilkan nilai *path coefficient* sebesar 0,309 dengan nilai *p-value* sebesar 0,001. Karena *p-value* lebih rendah daripada tingkat signifikansi  $\alpha$  ( $0,001 < 0,05$ ) Oleh karena itu, berdasarkan hasil yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh.
- g. Pengaruh retribusi (Z) terhadap infrastruktur desa (Y) menghasilkan nilai *path coefficient* sebesar 0,319 dengan nilai *p-value* sebesar 0,007. Karena *p-value* lebih rendah daripada tingkat signifikansi  $\alpha$  ( $0,007 < 0,05$ ) Oleh karena itu, berdasarkan hasil yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh.

Hipotesis	<i>Path coefficients</i>	<i>P values</i>	Keterangan
<b>X1 &gt; Z</b>	0.455	0.003	Signifikan
<b>X2 &gt; Z</b>	0.293	0.001	Signifikan
<b>X3 &gt; Z</b>	0.567	0.004	Signifikan
<b>X1 &gt; Y</b>	0.268	0.003	Signifikan
<b>X2 &gt; Y</b>	0.405	<0.001	Signifikan
<b>X3 &gt; Y</b>	0.309	<0.001	Signifikan
<b>Z &gt; Y</b>	0.319	0.007	Signifikan

**Tabel 3.** Nilai Koefisien Jalur Pengaruh Langsung

**D. Perhitungan Jalur Pengaruh Tidak Langsung**

Hasil yang diberikan dalam tabel 4 menunjukkan pengaruh tidak langsung dari variabel X1(dana desa), X2 (belanja modal), X3 (bagi hasil pajak) terhadap variabel Y (infrastruktur) melalui Z (retribusi) sebagai berikut :

- a. Pengaruh tidak langsung dari X1 (dana desa) ke Y (infrastruktur) adalah signifikan dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,434 dan *p-value* sebesar <0,001. Karena *p-value* lebih rendah daripada tingkat signifikansi  $\alpha$  ( $0,001 < 0,05$ ). Hal ini mengindikasikan bahwa adanya pengaruh positif yang signifikan dari dana desa (X1) terhadap infrastruktur (Y) melalui jalur yang melibatkan variabel Z (retribusi).
- b. Pengaruh tidak langsung dari X2 (belanja modal) ke Y (infrastruktur) memiliki koefisien jalur sebesar 0,769 dengan *p-value* sebesar 0,007. Karena *p-value* lebih besar daripada tingkat signifikansi  $\alpha$  ( $0,007 > 0,05$ ). Hal ini mengindikasikan bahwa adanya pengaruh positif yang signifikan dari belanja modal (X2) terhadap infrastruktur (Y) melalui jalur yang melibatkan variabel Z (retribusi).
- c. Pengaruh tidak langsung dari X3 (bagi hasil pajak) ke Y (infrastruktur) memiliki koefisien jalur sebesar 0,514 dengan *p-value* sebesar 0,007. Karena *p-value* lebih besar daripada tingkat signifikansi  $\alpha$  ( $0,007 > 0,05$ ). Hal ini mengindikasikan bahwa adanya pengaruh positif yang signifikan dari bagi hasil pajak (X3) terhadap infrastruktur (Y) melalui jalur yang melibatkan variabel Z (retribusi).

Hipotesis	<i>Indirect and total effects</i>	<i>P values for sums of indirect effects</i>	Keterangan
<b>X1 &gt; Y &gt; Z</b>	0.434	<0,001	Signifikan
<b>X2 &gt; Y &gt; Z</b>	0.769	0,007	Signifikan
<b>X3 &gt; Y &gt; Z</b>	0,514	0,007	Signifikan

**Tabel 4.** Nilai Koefisien Jalur Pengaruh Langsung

**E. Koefisien Determinan**

Koefisien determinasi di atas disajikan dalam bentuk *Adjusted R-squared coefficients* pada tabel. Berdasarkan nilai r-square pada tabel 5. menunjukkan bahwa manajemen mutu dan kompetensi mampu menjelaskan variabel retribusi sebesar 85,5% atau dikategorikan korelasi baik, dan sisanya sebesar 14,5% diterangkan oleh konstrak lainnya diluar yang diteliti dalam penelitian ini. Sedangkan manajemen mutu dan kompetensi mampu menjelaskan variabel infrastruktur sebesar 91,1% atau dikategorikan korelasi baik, dan sisanya sebesar 8,5% diterangkan oleh konstrak lainnya diluar yang diteliti dalam penelitian ini.

<i>Adjusted R-squared coefficients</i>				
-----				
X1	X2	X3	Z	Y
			0.855	0.911

**Tabel 5.** Uji Model Penelitian

**1. Dana Desa Berpengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa Di Kecamatan Gading**

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori pembangunan desa yang menekankan pentingnya alokasi dana dan efektivitas pengelolaan sumber daya dalam mendorong kemajuan wilayah pedesaan [26] Pendapat teori tersebut menyatakan bahwa penyaluran yang cepat, penyerapan anggaran yang optimal, serta peningkatan kapasitas aparatur merupakan determinan utama dalam keberhasilan pembangunan infrastruktur desa. Dengan demikian, temuan positif dan signifikan Dana Desa terhadap pembangunan infrastruktur di Kecamatan Gading menguatkan konsep bahwa pengelolaan keuangan desa yang berkelanjutan dan terencana secara efektif mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan fisik yang nyata dan pelayanan publik yang lebih baik

Hasil temuan pada penelitian ini menunjukkan bahwa, Penyaluran Dana Desa dari pemerintah pusat ke desa-desa di Kecamatan Gading menunjukkan tingkat realisasi yang tinggi. Sebagian besar desa menerima dana sesuai pagu dan tepat waktu. Hal ini menjadi fondasi penting bagi kelancaran pelaksanaan program pembangunan karena dana yang tersedia sejak awal tahun anggaran mempercepat proses perencanaan dan eksekusi kegiatan pembangunan desa. Penyaluran yang tepat waktu mencegah terjadinya keterlambatan dalam pelaksanaan proyek infrastruktur. Desa-desa di Kecamatan Gading umumnya menerima dana sesuai jadwal, sehingga tidak ada hambatan administratif yang berarti dalam tahap awal realisasi anggaran.

Efektivitas penggunaan Dana Desa diukur melalui persentase penyerapan dana oleh desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar desa di Kecamatan Gading mampu menyerap lebih dari 90% dana yang diterima setiap tahunnya. Dana tersebut digunakan untuk berbagai kegiatan, terutama pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya. Tingginya tingkat penyerapan dana menunjukkan bahwa desa mampu merencanakan dan melaksanakan program secara efektif. Penyerapan dana yang optimal juga menandakan adanya kebutuhan nyata di masyarakat dan kesiapan desa dalam mengelola anggaran.

Kecepatan penyaluran dana menjadi faktor krusial dalam percepatan pembangunan. Penelitian menemukan bahwa proses penyaluran Dana Desa di Kecamatan Gading berlangsung relatif cepat, sehingga desa dapat segera memulai pelaksanaan proyek infrastruktur. Penyaluran dana yang cepat memungkinkan desa menghindari penumpukan pekerjaan di akhir tahun anggaran. Kegiatan pembangunan dapat berjalan sesuai rencana tanpa tertunda akibat keterlambatan pencairan dana.

Capaian pembangunan infrastruktur diukur dari jumlah dan kualitas fasilitas fisik yang dibangun menggunakan Dana Desa. Penelitian menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada pembangunan jalan desa, jembatan, irigasi, dan fasilitas pelayanan publik lainnya di Kecamatan Gading. Infrastruktur yang dibangun memberikan dampak langsung pada peningkatan aksesibilitas dan kualitas hidup masyarakat desa.

Adanya Dana Desa memacu desa untuk lebih aktif dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan fisik yang dibutuhkan masyarakat.

Peningkatan kapasitas aparatur desa merupakan indikator penting dalam memastikan pengelolaan Dana Desa berjalan efektif, transparan, dan akuntabel. Di Kecamatan Gading, terdapat berbagai pelatihan dan pembinaan yang diberikan kepada aparatur desa, sehingga mereka mampu mengelola dana dengan baik. Aparatur desa yang terlatih mampu membuat perencanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan dengan lebih baik. Peningkatan kapasitas ini juga mendorong tata kelola pemerintahan desa yang lebih profesional dan partisipatif.

Hasil penelitian ini sejalan dengan studi-studi sebelumnya yang menunjukkan bahwa Dana Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan infrastruktur desa. Penyaluran dana yang tepat waktu dan sesuai pagu mempercepat pembangunan fisik, sedangkan tingkat penyerapan dana yang tinggi mencerminkan efektivitas pengelolaan anggaran desa. Kecepatan penyaluran dana juga memastikan pelaksanaan proyek berjalan lancar, dan pelatihan aparatur desa meningkatkan tata kelola Dana Desa. Dengan demikian, Dana Desa terbukti menjadi instrumen strategis dalam mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

## **2. Belanja Modal Berpengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa Di Kecamatan Gading.**

Hasil penelitian ini mendukung teori investasi publik yang menyatakan bahwa belanja modal yang tepat sasaran dan terencana secara matang merupakan faktor penting dalam mendorong pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi lokal Dukungan Pendapatan Asli Desa (PADes) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), serta pengelolaan yang efisien, memperkuat efektivitas belanja modal dalam meningkatkan kualitas infrastruktur desa [27]. Dengan demikian, temuan ini mengonfirmasi bahwa belanja modal tidak hanya memperbaiki fasilitas fisik, tetapi juga memberikan kontribusi jangka panjang terhadap kesejahteraan masyarakat serta kestabilan dan kinerja keuangan desa [28].

Hasil penelitian membuktikan bahwa belanja modal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan infrastruktur desa di Kecamatan Gading. Jenis pengeluaran yang tepat, perencanaan matang, dukungan PADes dan DAK, serta pengelolaan yang efisien menjadi faktor kunci keberhasilan pembangunan. Dampak jangka panjang dari belanja modal juga berkontribusi pada peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa, sekaligus memperkuat kinerja keuangan desa secara keseluruhan.

Hasil temuan secara mendalam pada penelitian ini, menunjukkan bahwa belanja modal di desa-desa Kecamatan Gading meliputi pengeluaran untuk pembangunan dan perbaikan aset tetap. Ini mencakup pengadaan tanah untuk fasilitas umum, pembelian peralatan desa, pembangunan gedung balai desa, serta pembangunan infrastruktur fisik seperti jalan desa, saluran irigasi, dan jaringan air bersih. Jenis pengeluaran ini menjadi fokus utama dalam mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur desa. Pengeluaran untuk aset tetap ini memberikan dasar fisik yang kuat bagi pelayanan publik dan aktivitas ekonomi desa. Investasi pada infrastruktur seperti jalan dan irigasi sangat vital untuk menunjang mobilitas dan produktivitas masyarakat desa.

Keberhasilan pembangunan infrastruktur sangat bergantung pada perencanaan belanja modal yang matang. Desa-desa di Kecamatan Gading yang melibatkan partisipasi masyarakat dan melakukan analisis kebutuhan secara tepat mampu mengelola belanja modal dengan efisien, meminimalkan pemborosan, dan memastikan penggunaan dana sesuai prioritas. Perencanaan yang baik meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan membantu memastikan program yang dilaksanakan benar-benar sesuai kebutuhan dan berdampak positif.

Penelitian menemukan bahwa kemampuan desa dalam membiayai belanja modal sangat dipengaruhi oleh besaran PADes dan DAK yang diterima. Desa dengan PADes yang kuat dan alokasi DAK memadai memiliki potensi lebih besar untuk melakukan belanja modal yang signifikan, sehingga mempercepat pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. PADes yang tinggi menunjukkan kemandirian finansial desa yang baik, memungkinkan pendanaan pembangunan tanpa terlalu bergantung pada dana eksternal. DAK sebagai dana tambahan memperkuat kapasitas desa untuk membiayai proyek-proyek strategis yang mendukung

pembangunan infrastruktur. Belanja modal yang dilakukan oleh desa-desa di Kecamatan Gading memberikan dampak positif jangka panjang bagi perekonomian desa. Pembangunan jalan dan irigasi yang berkualitas meningkatkan aksesibilitas dan produktivitas pertanian, membuka peluang usaha baru, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur yang baik mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dengan memperlancar distribusi hasil pertanian dan barang. Peningkatan fasilitas publik juga menarik investasi dan memperkuat basis ekonomi desa secara menyeluruh. Pengelolaan belanja modal yang efisien dan transparan berkorelasi positif dengan kinerja keuangan desa secara keseluruhan. Desa yang mampu mengelola belanja modal dengan baik meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan, yang pada gilirannya mendukung keberlanjutan pembangunan. Kinerja keuangan yang baik memungkinkan desa untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan secara berkelanjutan. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan belanja modal memperkuat partisipasi masyarakat dan dukungan pemerintah.

Temuan penelitian ini sesuai dengan studi sebelumnya yang menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap pembangunan infrastruktur desa. [28] menemukan bahwa pengeluaran modal untuk pembangunan jalan dan fasilitas umum meningkatkan kualitas infrastruktur dan layanan desa. [29] menekankan pentingnya perencanaan yang matang dan melibatkan masyarakat agar dana desa digunakan secara efisien. [6] juga menyatakan bahwa desa dengan Pendapatan Asli Desa (PADes) yang kuat dan dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) lebih mampu melakukan belanja modal yang mempercepat pembangunan infrastruktur. Hal ini menunjukkan bahwa kemandirian finansial desa sangat penting untuk keberlanjutan pembangunan.

### **3. Bagi Hasil Pajak Berpengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa Di Kecamatan Gading.**

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori desentralisasi fiskal yang menekankan pentingnya sumber pendapatan pajak yang memadai dan pengelolaan keuangan yang baik dalam mendukung pembangunan daerah [30]. Kepatuhan wajib pajak dan transparansi pengelolaan menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas pemanfaatan dana bagi hasil pajak dalam pembangunan infrastruktur [31]. Dengan demikian, temuan ini menguatkan bahwa peran aktif aparatur desa dan kesadaran pajak masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa pendapatan pajak dapat dioptimalkan sebagai sumber pembiayaan infrastruktur yang berkelanjutan dan berkontribusi pada kesejahteraan desa [32]. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bagi hasil pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan infrastruktur desa di Kecamatan Gading. Sumber pendapatan pajak yang kuat, kepatuhan wajib pajak, pengelolaan yang transparan dan akuntabel, peran aktif aparatur desa, serta peningkatan kesadaran pajak menjadi faktor utama yang mendorong keberhasilan pembangunan infrastruktur desa melalui dana pajak.

Hasil temuan secara mendalam dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Desa (PADes) di desa-desa Kecamatan Gading merupakan sumber pendapatan penting yang terdiri dari bagi hasil pajak daerah, retribusi daerah kabupaten/kota, dan pendapatan sah lainnya. Dana ini digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat. Dana bagi hasil pajak menjadi modal keuangan yang signifikan bagi desa dalam membiayai pembangunan infrastruktur. Keberadaan PADes yang stabil membantu desa dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan secara berkelanjutan.

Tingkat kepatuhan warga desa dalam membayar pajak tepat waktu dan sesuai kewajiban sangat memengaruhi besaran pendapatan pajak desa. Kepatuhan yang tinggi meningkatkan potensi pendapatan pajak yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan. Kepatuhan pajak menjadi indikator utama keberhasilan pengumpulan dana desa. Masyarakat yang taat membayar pajak memperkuat sumber pendanaan desa, sehingga memungkinkan pembangunan infrastruktur yang lebih optimal.

Pengelolaan hasil pajak di desa harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Pelaporan yang jelas dan mudah diakses oleh masyarakat meningkatkan kepercayaan warga dan mendorong partisipasi aktif dalam pembayaran pajak. Transparansi pengelolaan pajak memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Akuntabilitas dalam penggunaan dana pajak memastikan dana digunakan sesuai tujuan pembangunan.

Aparatur desa seperti kepala desa, bendahara, dan petugas pajak memiliki peran strategis dalam pemungutan dan pengelolaan pajak bumi dan bangunan serta jenis pajak lainnya. Keberhasilan mereka sangat menentukan besaran hasil pajak desa dan keberlanjutan pembangunan. Aparatur desa yang profesional dan berintegritas meningkatkan efektivitas pemungutan pajak. Peran aktif aparatur desa dalam sosialisasi dan pengelolaan pajak berdampak langsung pada peningkatan pendapatan desa.

Tingkat pengetahuan dan kesadaran wajib pajak memengaruhi kepatuhan pembayaran pajak. Edukasi dan sosialisasi rutin oleh aparat desa atau pemerintah kabupaten/kota dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kewajiban pajak dan manfaatnya bagi pembangunan desa. Peningkatan kesadaran pajak mendorong partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak. Edukasi perpajakan membantu mengurangi resistensi dan meningkatkan dukungan masyarakat terhadap program pembangunan desa.

#### **4. Dana Desa Berpengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap Retribusi Desa Di Kecamatan Gading**

Hasil penelitian membuktikan bahwa Dana Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan retribusi desa di Kecamatan Gading. Penyaluran dana yang tepat waktu dan sesuai pagu, efektivitas penyerapan dana, kecepatan pencairan, capaian pembangunan infrastruktur, serta peningkatan kapasitas aparatur desa menjadi faktor utama yang mendukung keberhasilan peningkatan retribusi desa. Dengan pengelolaan Dana Desa yang baik, desa dapat meningkatkan pelayanan dan fasilitas, sehingga mendorong partisipasi masyarakat dalam membayar retribusi yang pada akhirnya memperkuat keuangan desa.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori pengelolaan keuangan desa yang menekankan pentingnya alokasi dana yang tepat waktu dan efektif untuk meningkatkan kapasitas administrasi dan pelayanan publik di desa [33]. Penyaluran Dana Desa yang optimal memungkinkan desa memperbaiki infrastruktur dan layanan, yang pada gilirannya mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembayaran retribusi [34]. Dengan demikian, hasil ini menguatkan konsep bahwa pengelolaan Dana Desa yang baik tidak hanya memacu pembangunan fisik, tetapi juga meningkatkan sumber pendapatan asli desa melalui peningkatan retribusi, yang berkontribusi pada penguatan keuangan desa secara berkelanjutan [35].

Hasil temuan penelitian secara mendalam menunjukkan bahwa bahwa penyaluran Dana Desa dari pemerintah pusat ke desa-desa di Kecamatan Gading berjalan dengan baik, tepat waktu, dan sesuai pagu yang ditetapkan. Penyaluran yang tepat waktu ini menjadi tahap awal yang sangat penting dalam merealisasikan anggaran untuk pembangunan desa. Penyaluran dana yang tepat waktu memungkinkan desa segera memulai kegiatan pembangunan dan pengelolaan retribusi secara optimal. Kesesuaian dana yang diterima dengan pagu anggaran menghindari kekurangan dana yang dapat menghambat pelaksanaan program desa. Efektivitas penggunaan Dana Desa di Kecamatan Gading cukup tinggi, di mana sebagian besar desa mampu menyerap dana dengan baik. Dana tersebut digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, yang secara tidak langsung mendukung peningkatan retribusi desa. Penyerapan dana yang optimal menunjukkan kemampuan desa dalam mengelola anggaran secara efektif. Penggunaan dana untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik meningkatkan kualitas layanan yang dapat meningkatkan potensi retribusi desa. Kecepatan penyaluran Dana Desa di Kecamatan Gading relatif cepat, sehingga dana dapat segera dimanfaatkan untuk pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Kecepatan penyaluran meminimalkan jeda waktu antara pencairan dana dan pelaksanaan kegiatan, sehingga pembangunan berjalan lancar. Pelaksanaan program yang tepat waktu turut mendukung peningkatan retribusi desa melalui peningkatan pelayanan dan fasilitas.

Penggunaan Dana Desa telah menghasilkan peningkatan nyata pada fasilitas fisik desa, seperti pembangunan jalan desa, jembatan, irigasi, dan sarana pelayanan publik lainnya di Kecamatan Gading. Infrastruktur yang lebih baik meningkatkan akses dan kualitas layanan desa, yang berpotensi meningkatkan penerimaan retribusi dari masyarakat. Peningkatan fasilitas publik juga mendorong partisipasi masyarakat dalam membayar retribusi sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan desa. Peningkatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan dan pembinaan di Kecamatan Gading sangat berperan dalam pengelolaan Dana Desa yang efektif, transparan, dan akuntabel. Aparatur desa yang kompeten mampu mengelola dana dengan baik, termasuk dalam mengoptimalkan pengelolaan retribusi desa. Kapasitas yang meningkat juga memperkuat tata kelola pemerintahan desa sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana dan retribusi meningkat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan berbagai studi terdahulu yang menegaskan pengaruh positif Dana Desa terhadap peningkatan retribusi desa, penelitian oleh [36] menunjukkan bahwa penyaluran Dana Desa yang tepat waktu dan sesuai pagu sangat penting untuk memastikan kelancaran pelaksanaan pembangunan desa, yang secara langsung berdampak pada peningkatan penerimaan retribusi desa.

Selain itu, penelitian oleh [11] menyoroti pentingnya efektivitas penyerapan Dana Desa dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Mereka menemukan bahwa desa yang mampu mengelola dana dengan baik cenderung mengalami peningkatan signifikan dalam penerimaan retribusi, karena pembangunan infrastruktur yang memadai meningkatkan kepuasan dan partisipasi masyarakat. Penelitian lain oleh [37] juga menegaskan bahwa peningkatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan dan pembinaan sangat berperan dalam pengelolaan Dana Desa yang transparan dan akuntabel.

Dengan demikian, temuan penelitian ini memperkuat bukti empiris bahwa pengelolaan Dana Desa yang baik, mulai dari penyaluran, penyerapan, hingga peningkatan kapasitas aparatur desa, berkontribusi signifikan terhadap peningkatan retribusi desa dan keberlanjutan pembangunan di tingkat desa.

### **5. Belanja Modal Berpengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap Retribusi Desa Di Kecamatan Gading**

Hasil penelitian membuktikan bahwa belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan retribusi desa di Kecamatan Gading. Jenis pengeluaran yang tepat, perencanaan matang, dukungan PADes dan DAK, serta pengelolaan yang efisien menjadi faktor utama keberhasilan pembangunan. Dampak jangka panjang belanja modal juga berkontribusi pada peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa, sekaligus memperkuat kinerja keuangan desa secara keseluruhan.

Hasil penelitian ini mendukung teori pengelolaan fiskal desa yang menekankan bahwa belanja modal yang tepat sasaran dan direncanakan dengan baik dapat meningkatkan kapasitas desa dalam mengelola sumber daya keuangan [27]. Dukungan dari Pendapatan Asli Desa (PADes) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) serta pengelolaan yang efisien menjadi kunci keberhasilan dalam meningkatkan retribusi desa [28]. Dengan demikian, penelitian ini menguatkan bahwa belanja modal tidak hanya berdampak pada pembangunan fisik, tetapi juga berkontribusi jangka panjang dalam memperkuat perekonomian desa dan kinerja keuangan desa secara menyeluruh ([38]).

Penelitian menunjukkan bahwa belanja modal di desa-desa Kecamatan Gading meliputi pengeluaran untuk pembangunan dan perbaikan aset tetap, seperti pengadaan tanah untuk fasilitas umum, pembelian peralatan desa, pembangunan gedung balai desa, serta infrastruktur fisik seperti jalan desa, saluran irigasi, dan jaringan air bersih. Investasi pada aset tetap ini memberikan fondasi yang kuat bagi pelayanan publik dan aktivitas ekonomi desa. Peningkatan infrastruktur fisik secara langsung mendukung peningkatan potensi retribusi desa karena fasilitas yang lebih baik meningkatkan layanan kepada masyarakat. Perencanaan belanja modal yang matang menjadi kunci keberhasilan pembangunan infrastruktur. Desa yang melibatkan partisipasi masyarakat dan melakukan analisis kebutuhan secara tepat dapat meminimalkan pemborosan dan memastikan dana digunakan secara efisien. Perencanaan yang baik meningkatkan efektivitas penggunaan dana dan menghindari pemborosan. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan memastikan program yang dijalankan sesuai kebutuhan dan mendapat dukungan masyarakat, sehingga berkontribusi pada peningkatan retribusi.

Kemampuan desa dalam membiayai belanja modal sangat dipengaruhi oleh besaran PADes dan DAK yang diterima. Desa dengan PADes yang kuat dan alokasi DAK memadai memiliki potensi lebih besar untuk melakukan belanja modal signifikan, mempercepat pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. PADes yang tinggi menunjukkan kemandirian finansial desa, memungkinkan pembiayaan pembangunan tanpa terlalu bergantung pada dana eksternal. DAK sebagai dana tambahan memperkuat kapasitas desa untuk proyek strategis, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas layanan dan potensi retribusi.

Belanja modal yang dilakukan di desa-desa Kecamatan Gading diharapkan memberikan dampak positif jangka panjang bagi perekonomian desa. Pembangunan jalan dan irigasi berkualitas meningkatkan aksesibilitas dan produktivitas pertanian, membuka peluang usaha baru, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur yang baik memperlancar distribusi hasil pertanian dan barang, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Peningkatan fasilitas publik menarik investasi dan memperkuat basis ekonomi desa, yang berkontribusi pada peningkatan retribusi.

Belanja modal berkaitan erat dengan kinerja keuangan desa secara keseluruhan. Pengelolaan belanja modal yang efisien dan transparan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan, serta mendukung keberlanjutan pembangunan. Kinerja keuangan yang baik memungkinkan desa merencanakan dan melaksanakan program pembangunan secara berkelanjutan. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan belanja modal memperkuat partisipasi masyarakat dan dukungan pemerintah, yang berdampak positif pada penerimaan retribusi desa.

Hasil penelitian ini sejalan dengan berbagai studi sebelumnya yang menegaskan pengaruh positif belanja modal terhadap peningkatan retribusi desa dan pembangunan infrastruktur. Misalnya, penelitian oleh [39] menemukan bahwa pengeluaran modal yang diarahkan pada pembangunan aset tetap seperti jalan dan fasilitas umum secara signifikan meningkatkan kualitas layanan desa dan mendorong partisipasi masyarakat dalam membayar retribusi. Studi oleh [40] juga menekankan pentingnya perencanaan yang matang dan partisipatif dalam pengelolaan belanja modal untuk memaksimalkan efisiensi penggunaan dana desa. Mereka menunjukkan bahwa desa yang memiliki perencanaan baik mampu mengurangi pemborosan dan meningkatkan hasil pembangunan, yang berdampak positif pada penerimaan retribusi. Selain itu, penelitian oleh [37] mengungkapkan bahwa kemandirian finansial desa melalui Pendapatan Asli Desa (PADes) dan dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) sangat berperan dalam memperkuat kapasitas belanja modal desa. Desa dengan PADes tinggi dan alokasi DAK memadai lebih mampu melakukan investasi infrastruktur yang berkualitas, yang pada akhirnya meningkatkan potensi retribusi desa.

## **6. Bagi Hasil Pajak Berpengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap Retribusi Desa Di Kecamatan Gading**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bagi hasil pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan retribusi desa di Kecamatan Gading. Sumber pendapatan pajak yang kuat, kepatuhan wajib pajak, pengelolaan yang transparan dan akuntabel, peran aktif aparatur desa, serta peningkatan kesadaran pajak menjadi faktor utama yang mendorong keberhasilan peningkatan retribusi desa dan pembangunan berkelanjutan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori desentralisasi fiskal yang menekankan pentingnya sumber pendapatan pajak yang stabil dan pengelolaan keuangan yang transparan dalam meningkatkan kapasitas fiskal daerah [30]. Kepatuhan wajib pajak serta peran aktif aparatur desa dan kesadaran pajak masyarakat merupakan faktor kunci dalam meningkatkan pendapatan asli desa melalui retribusi [31]. Dengan demikian, temuan ini menguatkan bahwa peningkatan bagi hasil pajak dapat mendorong peningkatan retribusi desa yang berkontribusi pada pembangunan desa yang berkelanjutan dan penguatan keuangan desa secara keseluruhan [32].

Hasil temuan secara mendalam menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Desa (PADes) di desa-desa Kecamatan Gading merupakan salah satu sumber pendapatan penting yang terdiri dari bagi hasil pajak daerah, retribusi daerah kabupaten/kota, serta pendapatan sah lainnya. Dana ini digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana bagi hasil pajak menjadi modal penting bagi desa untuk membiayai berbagai kebutuhan, termasuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Besarnya dana yang diterima dari bagi hasil pajak secara langsung berkontribusi pada kemampuan desa dalam meningkatkan penerimaan retribusi. Kepatuhan warga desa dalam membayar pajak tepat waktu dan sesuai kewajiban sangat memengaruhi besaran pendapatan pajak desa. Tingkat kepatuhan ini menjadi indikator penting karena semakin tinggi kepatuhan, semakin besar potensi pendapatan pajak yang dapat digunakan untuk pembangunan desa. Kepatuhan pajak yang tinggi memperkuat sumber pendapatan desa dan memungkinkan peningkatan pelayanan serta fasilitas yang mendukung retribusi. Masyarakat yang sadar dan patuh membayar pajak akan meningkatkan stabilitas keuangan desa.

Pengelolaan hasil pajak di desa harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Pelaporan yang jelas dan mudah diakses oleh masyarakat meningkatkan kepercayaan warga dan mendorong partisipasi aktif dalam pembayaran pajak. Transparansi pengelolaan pajak meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, sehingga mendorong partisipasi lebih besar dalam pembayaran pajak dan retribusi. Akuntabilitas memastikan dana pajak digunakan sesuai tujuan pembangunan desa.

Aparatur desa, seperti kepala desa, bendahara, dan petugas pajak, memiliki peran strategis dalam pemungutan dan pengelolaan pajak bumi dan bangunan serta jenis pajak lainnya. Keberhasilan mereka sangat menentukan besaran hasil pajak desa dan keberlanjutan pembangunan. Aparatur desa yang profesional dan berintegritas meningkatkan efektivitas pemungutan pajak. Peran aktif aparatur desa dalam sosialisasi dan pengelolaan pajak berdampak langsung pada peningkatan pendapatan desa. Tingkat pengetahuan dan kesadaran wajib pajak memengaruhi kepatuhan pembayaran pajak. Edukasi dan sosialisasi rutin oleh aparat desa atau pemerintah kabupaten/kota dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kewajiban pajak dan manfaatnya bagi pembangunan desa. Peningkatan kesadaran pajak mendorong partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak dan retribusi. Edukasi perpajakan membantu mengurangi resistensi dan meningkatkan dukungan masyarakat terhadap program pembangunan desa.

Penelitian ini didukung oleh studi yang menunjukkan bahwa bagi hasil pajak merupakan sumber pendapatan daerah yang potensial dan berkontribusi signifikan terhadap belanja dan pembangunan desa [41]. Selain itu, penelitian lain menegaskan bahwa kepatuhan wajib pajak dan pengelolaan pajak yang transparan meningkatkan pendapatan desa, sehingga mempercepat pembangunan. Secara keseluruhan, dana bagi hasil pajak dan retribusi menjadi modal penting dalam mendukung keberlanjutan pembangunan desa.

## **7. Retribusi Berpengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa Di Kecamatan Gading.**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa retribusi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan infrastruktur desa di Kecamatan Gading. Hal ini menegaskan pentingnya retribusi sebagai sumber pendapatan asli desa yang mendukung keberlanjutan pembangunan infrastruktur.

Pemungutan retribusi di desa-desa Kecamatan Gading dilakukan dengan tujuan yang jelas, yaitu untuk membiayai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta penyediaan layanan publik. Efektivitas pemungutan menjadi kunci agar penerimaan retribusi dapat optimal dan dapat meminimalkan kebocoran dana, sehingga sumber pendapatan ini dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk pembangunan desa. Dalam penerapannya, retribusi memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran. Masyarakat dengan kondisi ekonomi serupa dikenakan tarif yang sama (keadilan horizontal), sementara kelompok dengan kemampuan finansial lebih membayar lebih (keadilan vertikal). Prinsip tersebut meningkatkan rasa keadilan sosial dan mendorong kepatuhan masyarakat dalam membayar retribusi.

Besaran retribusi yang dipungut disesuaikan dengan layanan atau fasilitas yang diterima masyarakat, seperti penggunaan pasar desa, fasilitas parkir, dan layanan kebersihan. Kesesuaian ini membuat masyarakat merasa wajar dan tidak dirugikan, sehingga meningkat rasa kepercayaan dan kepatuhan dalam pembayaran retribusi yang akhirnya mendukung pengelolaan dana desa. Indikator kinerja retribusi diukur dari pencapaian target penerimaan yang dibandingkan dengan anggaran yang ditetapkan dalam APBDes. Desa yang mampu mencapai atau bahkan melampaui target menunjukkan pengelolaan retribusi yang efektif dan efisien. Sebaliknya, pencapaian rendah memperlihatkan perlunya evaluasi dan perbaikan sistem pemungutan serta pengelolaan retribusi. Selain itu, pengelolaan retribusi dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Desa menyusun laporan keuangan yang jelas dan mudah diakses masyarakat. Pengawasan efektif juga diterapkan untuk mencegah penyalahgunaan dana retribusi, memperkuat kepercayaan masyarakat, dan memastikan dana digunakan sesuai dengan tujuan pembangunan infrastruktur desa. Secara keseluruhan, indikator-indikator tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan retribusi yang baik di Kecamatan Gading berkontribusi signifikan dalam memperkuat kapasitas keuangan desa, mendorong pembangunan infrastruktur berkualitas, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Dukungan penelitian terdahulu yang sejalan dengan temuan ini di antaranya adalah penelitian oleh [42] yang menegaskan pentingnya pemungutan retribusi yang efektif dan transparan untuk memperkuat pendapatan asli desa. Selain itu, studi oleh [43] juga menunjukkan bahwa kepatuhan masyarakat dan prinsip keadilan dalam pengenaan retribusi mendukung keberlanjutan pembangunan infrastruktur desa.

## **8. Dana Desa Berpengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa Di Kecamatan Gading, Melalui Retribusi.**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Desa memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan infrastruktur di desa-desa Kecamatan Gading melalui variabel retribusi sebagai variabel

intervening. Temuan ini didasarkan pada analisis beberapa indikator utama berikut. Penyaluran Dana Desa dari pemerintah pusat ke desa-desa di Kecamatan Gading berjalan sesuai pagu dan jadwal yang telah ditetapkan. Tingginya persentase penyaluran mencerminkan komitmen pemerintah dalam mendukung pembangunan desa. Penyaluran yang tepat waktu menjadi fondasi penting agar program pembangunan dapat segera direalisasikan. Sebagian besar desa di Kecamatan Gading mampu menyerap Dana Desa secara optimal. Laporan realisasi anggaran memperlihatkan bahwa dana digunakan secara efektif untuk berbagai kegiatan pembangunan, seperti pembangunan jalan, jembatan, dan pemberdayaan masyarakat. Tingkat penyerapan yang tinggi menjadi indikator keberhasilan desa dalam mengelola anggaran yang diterima.

Proses penyaluran Dana Desa yang relatif cepat memungkinkan desa-desa di Kecamatan Gading segera melaksanakan program pembangunan infrastruktur. Kecepatan ini sangat krusial agar manfaat pembangunan dapat segera dirasakan masyarakat dan menghindari keterlambatan realisasi program. Penggunaan Dana Desa berdampak nyata pada peningkatan fasilitas fisik desa. Infrastruktur seperti jalan desa, jembatan, irigasi, dan sarana pelayanan publik mengalami peningkatan signifikan. Temuan ini memperkuat posisi Dana Desa sebagai motor penggerak utama pembangunan fisik di tingkat desa. Kapasitas aparatur desa juga meningkat melalui pelatihan dan pembinaan yang berkelanjutan. Aparatur yang kompeten mampu mengelola dana secara transparan dan akuntabel, sehingga pembangunan berjalan efektif dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain Dana Desa, retribusi desa berperan sebagai variabel intervening yang memperkuat hubungan antara Dana Desa dan pembangunan infrastruktur. Berikut hasil temuan terkait indikator retribusi. Retribusi dipungut dengan tujuan jelas, yaitu membiayai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pelayanan publik. Efektivitas pemungutan tercermin dari optimalnya penerimaan retribusi dan minimnya kebocoran, sehingga dana yang terkumpul dapat langsung digunakan untuk pembangunan. Penerapan retribusi memperhatikan prinsip keadilan dan kewajiban. Masyarakat dengan kondisi ekonomi serupa dikenakan tarif yang sama, sedangkan yang lebih mampu membayar lebih tinggi. Hal ini menciptakan rasa keadilan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembayaran retribusi. Besaran retribusi yang dipungut sebanding dengan layanan atau fasilitas yang diterima, seperti penggunaan pasar desa, fasilitas parkir, atau layanan kebersihan. Kesesuaian ini meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar retribusi serta kepercayaan terhadap pengelolaan dana desa. Kinerja retribusi diukur dari pencapaian target penerimaan dibandingkan dengan anggaran yang ditetapkan. Desa yang mampu mencapai atau melampaui target menunjukkan pengelolaan retribusi yang efektif dan efisien. Sebaliknya, pencapaian yang rendah menjadi dasar evaluasi untuk perbaikan sistem pemungutan. Pengelolaan retribusi dilakukan secara transparan dan akuntabel. Laporan keuangan disusun secara jelas dan dapat diakses masyarakat, serta terdapat pengawasan efektif untuk mencegah penyalahgunaan dana retribusi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan oleh [44] yang menegaskan bahwa Dana Desa berperan penting sebagai sumber pembiayaan utama dalam pembangunan infrastruktur pedesaan. Penyaluran dana yang tepat waktu dan penyerapan yang optimal meningkatkan kepercayaan masyarakat serta mencerminkan kapasitas manajerial desa dalam mengelola sumber daya untuk pembangunan berkelanjutan. Kecepatan penyaluran. Peran retribusi sebagai variabel intervening juga diperkuat oleh penelitian [45], yang menunjukkan bahwa pengelolaan retribusi yang adil, efektif, dan akuntabel menambah sumber pembiayaan desa, mempercepat pembangunan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat.

## **9. Belanja Modal Berpengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa Di Kecamatan Gading, Melalui Retribusi.**

Dalam upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur di desa, belanja modal memegang peranan penting sebagai salah satu sumber pembiayaan utama. Pengelolaan belanja modal yang efektif dan efisien, didukung oleh pendapatan desa dan mekanisme retribusi yang baik, menjadi faktor kunci dalam mempercepat pembangunan infrastruktur yang berdampak positif bagi masyarakat desa. Berikut adalah penjelasan hasil penelitian terkait pengaruh belanja modal terhadap pembangunan infrastruktur desa di Kecamatan Gading melalui retribusi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja modal di desa-desa Kecamatan Gading meliputi pengeluaran untuk pembangunan dan perbaikan aset tetap yang sangat strategis, seperti pengadaan tanah untuk fasilitas

umum, pembelian peralatan desa, pembangunan gedung balai desa, serta pembangunan infrastruktur fisik seperti jalan desa, saluran irigasi, dan jaringan air bersih. Pengeluaran jenis ini menjadi fondasi utama dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur desa yang mendukung pelayanan publik dan aktivitas ekonomi masyarakat. Keberhasilan pembangunan infrastruktur sangat dipengaruhi oleh perencanaan belanja modal yang matang dan partisipatif. Desa-desanya di Kecamatan Gading yang mampu melakukan perencanaan dengan melibatkan masyarakat dan melakukan analisis kebutuhan secara tepat dapat meminimalkan pemborosan serta memastikan penggunaan dana yang efisien dan tepat sasaran. Pengelolaan yang baik ini memperkuat efektivitas belanja modal dalam mendukung pembangunan infrastruktur. Pendapatan Asli Desa (PADes) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) menjadi faktor penting yang mempengaruhi kemampuan desa dalam melakukan belanja modal. Desa dengan PADes yang kuat dan alokasi DAK yang memadai di Kecamatan Gading memiliki potensi lebih besar untuk melakukan belanja modal signifikan. Hal ini memungkinkan percepatan pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung pada peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat desa.

Belanja modal yang dilakukan oleh desa-desanya di Kecamatan Gading tidak hanya berdampak pada pembangunan fisik jangka pendek, tetapi juga memberikan efek positif jangka panjang bagi perekonomian desa. Infrastruktur seperti jalan dan irigasi yang berkualitas meningkatkan aksesibilitas dan produktivitas pertanian, membuka peluang usaha baru, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan. Pengelolaan belanja modal yang efisien dan transparan berkontribusi pada peningkatan kinerja keuangan desa secara keseluruhan. Desa-desanya di Kecamatan Gading yang mampu mengelola belanja modal dengan baik meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap pengelolaan keuangan desa. Hal ini mendukung keberlanjutan pembangunan dan memperkuat tata kelola pemerintahan desa.

Penelitian ini sejalan dengan studi sebelumnya yang menunjukkan belanja modal berpengaruh positif terhadap pembangunan infrastruktur dan perekonomian daerah. [46] menemukan belanja modal mempercepat pembangunan infrastruktur di Papua, mendukung pertumbuhan ekonomi. [18] juga menunjukkan dampak positif belanja modal pada pertumbuhan ekonomi di beberapa provinsi. [14] menyoroti penggunaan belanja modal untuk jalan, irigasi, dan gedung yang penting bagi layanan publik di Kabupaten Poso [47] menambahkan bahwa belanja modal pada aset tetap memberikan manfaat jangka panjang, memperkuat sektor kesehatan dan pendidikan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui pengelolaan yang transparan dan efisien.

## **10. Bagi Hasil Pajak Berpengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa Di Kecamatan Gading, Melalui Retribusi.**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bagi Hasil Pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan infrastruktur desa di Kecamatan Gading melalui mekanisme retribusi. Temuan ini didukung oleh beberapa indikator utama yang menjadi fokus pembahasan.

Hasil temuan mendalam yakni sumber pendapatan pajak desa menjadi modal utama dalam pembangunan infrastruktur. Pendapatan Asli Desa (PADes), yang meliputi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, merupakan sumber pendapatan penting yang digunakan untuk mendukung pemerintahan desa, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini sejalan dengan temuan dalam berbagai penelitian yang menegaskan bahwa dana bagi hasil pajak merupakan modal penting bagi desa dalam meningkatkan belanja pembangunan infrastruktur. Kepatuhan Wajib Pajak sangat menentukan besaran pendapatan pajak desa. Kepatuhan warga dalam membayar pajak tepat waktu dan sesuai kewajiban meningkatkan potensi pendapatan pajak yang dapat dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur. Tingkat kepatuhan yang tinggi mendorong keberlanjutan pendanaan pembangunan desa. Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Pajak menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan masyarakat. Pengelolaan pajak yang transparan dan akuntabel dengan pelaporan yang mudah diakses mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembayaran pajak, sehingga memperkuat sumber dana bagi pembangunan infrastruktur desa. Peran Aparatur Desa seperti kepala desa dan petugas pajak sangat strategis dalam pemungutan dan pengelolaan pajak. Keberhasilan mereka dalam menjalankan tugasnya menentukan besaran hasil pajak desa dan kelangsungan pembangunan infrastruktur. Hal ini sejalan dengan kajian yang menekankan pentingnya peran aparatur desa dalam pengelolaan keuangan desa agar pembangunan berjalan efektif [48] Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Pajak juga berperan dalam meningkatkan kepatuhan

pembayaran pajak. Edukasi dan sosialisasi yang rutin oleh aparat desa atau pemerintah kabupaten/kota dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kewajiban pajak dan manfaatnya bagi pembangunan desa. Peningkatan kesadaran ini sangat penting untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan infrastruktur melalui pajak.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menguatkan temuan sebelumnya yang menyatakan bahwa dana bagi hasil pajak berkontribusi signifikan terhadap pembangunan infrastruktur, terutama jika didukung oleh pengelolaan yang transparan, kepatuhan wajib pajak yang tinggi, serta peran aktif aparat desa [49] Dengan demikian, bagi hasil pajak melalui mekanisme retribusi menjadi sumber pembiayaan yang efektif dalam mempercepat pembangunan infrastruktur desa di Kecamatan Gading, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Penelitian ini sejalan dengan [49] yang menemukan bahwa dana bagi hasil pajak berpengaruh positif signifikan terhadap infrastruktur, dengan belanja modal sebagai mediator. Dana bagi hasil pajak dan retribusi merupakan sumber pendapatan penting untuk pembangunan desa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019. [1] dan studi di Wonogiri menunjukkan pengaruh bagi hasil pajak tidak selalu signifikan, disebabkan oleh metode pembagian dana yang kurang variatif dan pengelolaan yang kurang optimal. Oleh karena itu, transparansi, akuntabilitas, dan edukasi pajak perlu ditingkatkan untuk memaksimalkan manfaat dana bagi hasil pajak dalam pembangunan infrastruktur desa.

## Simpulan

Berdasarkan hasil analisis, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Dana Desa memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan infrastruktur desa. Dana ini menjadi sumber utama yang mempercepat penyediaan dan perbaikan infrastruktur dasar seperti jalan, irigasi, dan fasilitas umum lainnya yang mendukung aktivitas ekonomi dan pelayanan masyarakat.
2. Belanja modal berkontribusi positif dan signifikan dalam pembangunan infrastruktur desa. Penggunaan belanja modal yang tepat dan terencana memungkinkan pembangunan aset tetap yang mendukung peningkatan kualitas infrastruktur desa.
3. Dana bagi hasil pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan infrastruktur desa. Pendapatan asli desa yang berasal dari bagi hasil pajak menjadi sumber pembiayaan penting yang mendukung pembangunan fisik desa.
4. Dana Desa juga berpengaruh positif terhadap peningkatan retribusi desa. Dana Desa yang dikelola dengan baik mendorong optimalisasi pemungutan retribusi sebagai sumber pendapatan desa tambahan.
5. Belanja modal berpengaruh positif terhadap retribusi desa, dimana peningkatan belanja modal dapat meningkatkan kapasitas desa dalam mengelola dan memungut retribusi secara efektif dan efisien.
6. Dana bagi hasil pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap retribusi desa. Pendapatan asli desa yang berasal dari bagi hasil pajak menjadi sumber pembiayaan penting yang mendukung pembangunan fisik desa
7. Retribusi desa berperan penting dan berpengaruh positif signifikan terhadap pembangunan infrastruktur. Dana yang diperoleh dari retribusi mendukung pembiayaan pembangunan fisik desa.
8. Dana Desa secara tidak langsung memperkuat pembangunan infrastruktur melalui peningkatan retribusi desa, sehingga terdapat efek mediasi yang signifikan dari retribusi dalam hubungan antara Dana Desa dan pembangunan infrastruktur.
9. Belanja modal juga berpengaruh tidak langsung terhadap pembangunan infrastruktur melalui mekanisme retribusi, dimana peningkatan belanja modal meningkatkan kemampuan desa dalam memungut retribusi yang selanjutnya digunakan untuk pembangunan.

10. Bagi hasil pajak berdampak positif terhadap pembangunan infrastruktur dengan peran retribusi sebagai variabel intervening yang memperkuat hubungan tersebut. Peningkatan pendapatan dari bagi hasil pajak mendorong peningkatan retribusi yang pada akhirnya mempercepat pembangunan infrastruktur desa.

## Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut.

### 1. Bagi Pemerintah Desa

- a. Disarankan untuk terus meningkatkan pengelolaan Dana Desa, Belanja Modal, dan Bagi Hasil Pajak secara transparan dan akuntabel agar dana yang diterima dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pembangunan infrastruktur desa.
- b. Pemerintah desa perlu memperkuat mekanisme pemungutan retribusi dengan pendekatan partisipatif dan edukasi kepada masyarakat agar tingkat kepatuhan meningkat, sehingga sumber pendanaan desa menjadi lebih stabil dan berkelanjutan.
- c. Perencanaan pembangunan infrastruktur harus dilakukan secara matang dengan melibatkan masyarakat agar kebutuhan yang diutamakan benar-benar sesuai prioritas dan berdampak luas bagi kesejahteraan desa.

### 2. Bagi Aparatur Desa

- a. Aparatur desa perlu meningkatkan kapasitas dan kompetensi dalam pengelolaan keuangan desa, terutama dalam pengelolaan Dana Desa, Belanja Modal, dan pendapatan dari bagi hasil pajak serta retribusi.
- b. Diperlukan pelatihan dan pembinaan secara berkala untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan dana desa agar pembangunan infrastruktur berjalan lancar dan tepat sasaran.

### 3. Bagi Masyarakat Desa

- a. Masyarakat diharapkan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam membayar pajak dan retribusi desa sebagai bentuk partisipasi aktif dalam pembangunan desa.
- b. Masyarakat juga dianjurkan untuk menjaga dan merawat infrastruktur yang telah dibangun agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.

### 4. Bagi Peneliti Selanjutnya

- a. Disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan memperluas cakupan wilayah dan variabel lain yang dapat memengaruhi pembangunan infrastruktur desa, seperti peran teknologi informasi, partisipasi masyarakat, dan faktor eksternal lainnya.
- b. Penelitian mendatang dapat menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif secara kombinasi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang pengelolaan dana desa dan dampaknya.

## References

- [1] S. N. Saputri and S. Rahayu, "Pengaruh Dana Desa, Pembangunan Infrastruktur, dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Desa: Studi Kasus pada Desa di Kecamatan Bawang Tahun 2018–2020," *EKOMBIS Review: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, vol. 11, no. 1, pp. 53–62, 2023, doi: 10.37676/ekombis.v11i1.2780.
- [2] S. Mardiyani and Izharudin, "Pengaruh Infrastruktur, Belanja Pariwisata, dan Investasi Domestik Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera," *Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi dan Ilmu Ekonomi*, vol. 10, no. 1, pp. 296–310, 2024.
- [3] R. Adisasmita, *Teori-Teori Pembangunan Ekonomi*. Yogyakarta, Indonesia: Graha Ilmu, 2013.
- [4] A. Asnudin, "Pembangunan Infrastruktur Pedesaan dengan Pelibatan Masyarakat Setempat," *SMARTek*, vol. 3, no. 1, pp. 1–15, 2009.
- [5] S. H. Lubis, Nurhayati, and H. Herawati, "Kajian Infrastruktur Perdesaan di Kecamatan Jelimpo Kabupaten Landak," *Jurnal Teknik Sipil*, vol. 17, no. 2, 2017, doi: 10.26418/jtsft.v17i2.26877.

- [6] A. E. Iftitah and P. Wibowo, "Pengaruh Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Pendapatan Asli Desa Terhadap Indeks Desa Membangun di Kabupaten Gowa," *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, vol. 48, no. 1, pp. 17–36, 2022, doi: 10.33701/jipwp.v48i1.2331.
- [7] R. D. Anggraeni and S. Sapari, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal," *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, vol. 12, no. 7, pp. 1–19, 2023.
- [8] A. Sutedi, *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*, 1st ed. Bogor, Indonesia: Ghalia Indonesia, 2008.
- [9] D. P. Korpiyoni, "Pemanfaatan Infrastruktur dan Ruang Pasca Pembangunan Infrastruktur di Desa Kerta, Payangan, Gianyar," *Paduraksa: Jurnal Teknik Sipil Universitas Warmadewa*, vol. 10, no. 2, pp. 297–316, 2021.
- [10] T. Mirnasari and Y. Yamin, "Pengaruh Promosi Terhadap Peningkatan Volume Penjualan UMKM Keripik Pisang di Gang PU Bandar Lampung," *Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, vol. 2, no. 1, pp. 40–44, 2022, doi: 10.24967/psn.v2i1.1460.
- [11] V. E. Supriadi, A. Soelistyo, and Y. Syaifullah, "Analisis Pengaruh Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar," *Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE)*, vol. 4, no. 3, pp. 401–413, 2021, doi: 10.22219/jie.v4i3.12363.
- [12] N. Rohmah, O. Wisdaningrum, and M. Iswahyudi, "Pengaruh Belanja Modal, Belanja Pemeliharaan serta Belanja Barang dan Jasa Terhadap Realisasi Anggaran Pemerintah Desa," *Al-Muhasib: Jurnal Islamic Accounting and Finance*, vol. 1, no. 1, pp. 88–108, 2022, doi: 10.30762/almuhasib.v1i1.66.
- [13] E. A. Novitasari, Y. A. Pravasanti, and M. H. Ma'ruf, "Pengaruh Pembangunan Infrastruktur, Dana Desa serta Bagi Hasil Pajak Retribusi Terhadap Belanja Modal Desa: Studi Empiris di Desa se-Kecamatan Delanggu Tahun 2018–2022," *Jurnal Ilmiah Keuangan, Akuntansi, dan Bisnis*, vol. 3, no. 2, pp. 497–504, 2023, doi: 10.53088/jikab.v3i2.82.
- [14] I. Saputra, Nurhidayah, and E. Saraswati, "Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Alokasi Dana Desa, serta Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Terhadap Belanja Desa Bidang Pendidikan: Studi Kasus di Desa Bringin, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang," *e-Jurnal Riset Manajemen*, vol. 11, no. 3, pp. 23–36, 2022.
- [15] R. G. Mais and W. Yuniara, "Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di DKI Jakarta Periode 2015–2019," *Prosiding Konferensi Nasional Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, vol. 1177, pp. 1–10, 2021.
- [16] R. D. Anggraeni and S. Sapari, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal," *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, vol. 12, no. 7, pp. 1–19, 2023.
- [17] K. Hasan and M. E. Tanesab, "Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, dan Alokasi Dana Perimbangan Desa Terhadap Belanja Desa," *Jurnal Manajemen Sains dan Organisasi*, vol. 2, no. 3, pp. 166–178, 2022, doi: 10.52300/jmso.v2i3.3632.
- [18] M. P. Dwigantara and N. Handayani, "Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Intervening," *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, vol. 9, no. 10, pp. 1–22, 2021.
- [19] Y. Faisal, L. P. Yanti, and Novelita, "Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal," *Jurnal Samudra Ekonomi*, vol. 8, no. 1, pp. 402–412, 2024, doi: 10.33059/jse.v8i1.9526.
- [20] Y. D. Pranata and S. Biduri, "Pengaruh Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Dana Desa, dan Bantuan Keuangan APBD Terhadap Belanja Desa: Studi pada Desa di Kabupaten Sidoarjo," *Universitas Muhammadiyah Sidoarjo*, 2023.
- [21] K. R. N. Saputra and N. M., "Analisis Pembangunan Sebelum dan Sesudah Adanya Dana Desa di Desa Sukorejo, Ngasem, Kabupaten Kediri," *Aksime*, vol. 1, pp. 46–52, Sep. 2024.
- [22] V. W. Sujarweni, *Metodologi Penelitian: Lengkap, Praktis dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta, Indonesia: Pustaka Baru Press, 2022.
- [23] S. Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta, Indonesia: Rineka Cipta, 2006.
- [24] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung, Indonesia: Alfabeta, 2014.
- [25] I. Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*, 9th ed. Semarang, Indonesia: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2018.
- [26] O. Safitri, "Transparansi Dana Desa dalam Pembangunan Desa Pulorejo, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang," *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, vol. 4, no. 2, pp. 59–70, 2021.

- [27] K. Kurniawan, "Evaluasi Dampak Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa di Indonesia," *Forum Ekonomi: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, vol. 23, no. 3, pp. 513–522, 2021.
- [28] S. B. Astuti, S. F. Santoso, and S. Bantasyam, "Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal: Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015–2019," *Jurnal Ilmiah Akuntansi Pancasila*, vol. 1, no. 2, pp. 94–105, 2021.
- [29] N. R. N. Putri and I. Nuraini, "Pengaruh Dana Bagi Hasil dan Dana Desa Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Modal sebagai Variabel Moderasi di Koridor Bali–Nusa Tenggara," *Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE)*, vol. 7, no. 2, pp. 281–293, 2023.
- [30] W. E. Oates, *Fiscal Federalism*. New York, NY, USA: Harcourt Brace Jovanovich, 1972.
- [31] E. M. Zolt and R. M. Bird, "Redistribution via Taxation: The Limited Role of the Personal Income Tax in Developing Countries," *UCLA Law Review*, vol. 52, pp. 1627–1695, 2005.
- [32] M. V. Tanzi, *Money Laundering and the International Financial System*. Washington, DC, USA: International Monetary Fund, 1996.
- [33] Mardiasmo, *Perpajakan*, 20th ed. Yogyakarta, Indonesia: Andi Offset, 1995.
- [34] M. P. Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta, Indonesia: Rajagrafindo Persada, 2016.
- [35] E. Bawinto and L. A. O. Tanor, "Pengaruh Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, dan Pembangunan Infrastruktur Terhadap Belanja Modal Desa dengan Retribusi sebagai Variabel Intervening: Studi Kasus pada Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa Tahun 2019–2023," *Jurnal Ekonomi Kependidikan, Manajemen, dan Akuntansi*, vol. 2, no. 3, pp. 9–18, 2024.
- [36] Y. Ramadiana, "Pengaruh Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, Pembangunan Infrastruktur, dan Retribusi Terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan," *Kindai*, vol. 20, no. 1, pp. 34–47, 2024.
- [37] S. D. Fitrianiingsih, I. K. B. Dwijaya, and S. Rahmawaty, "Pertumbuhan Ekonomi sebagai Moderator Pengaruh Pajak, Retribusi, dan Dana Perimbangan," *Jurnal Kolaboratif Sains*, vol. 8, no. 5, pp. 2080–2091, 2025.
- [38] J. Burkhead and A. R. Prest, *Public Finance in Theory and Practice*. New York, NY, USA: McGraw-Hill, 1961.
- [39] F. P. Eko and A. F. D. Noor, "Pengaruh Penyuluhan Standar Operasional Prosedur Proses Pelimpahan Wewenang Terhadap Kepatuhan Melaksanakan Tindakan Keperawatan," *Peran Mikronutrisi sebagai Upaya Pencegahan Covid-19*, vol. 12, no. 1, pp. 75–82, 2022.
- [40] H. Hendra and A. H. Fahlevi, "Implementation of Good Corporate Governance Principles in PDAM Tirta Ogan, Ogan Ilir District," *IAPA Proceedings Conference*, p. 187, 2024, doi: 10.30589/proceedings.2024.1052.
- [41] I. Irmawati, "Pengaruh Manajemen Modal Kerja dan Likuiditas Terhadap Profitabilitas pada Industri Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019–2021," *Bongaya Journal for Research in Management*, vol. 6, no. 1, pp. 38–45, 2023, doi: 10.37888/bjrm.v6i1.441.
- [42] I. Irmawati, A. B. Syam, Baharuddin, and Sudirman, "Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Melalui Pajak dan Retribusi," *Jurnal Ilmiah Administrasi*, vol. 15, no. 1, pp. 74–82, 2024, doi: 10.47030/administrasita.v15i1.752.
- [43] C. A. A. Venda, "Peran Pemerintah Daerah dalam Mengelola Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pariwisata Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah," *UNES Law Review*, vol. 6, no. 1, pp. 582–593, 2023.
- [44] A. Samsuddin, "Implementasi Penggunaan Dana Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara," *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, vol. 4, no. 2, pp. 59–70, 2022.
- [45] I. Darmayanti, "Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Jumlah Penduduk sebagai Variabel Moderasi," *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam*, vol. 2, no. 1, pp. 44–55, 2025.
- [46] I. Weya and I. Lubis, "Pengaruh Pembangunan Manusia dan Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Papua," in *Seminar Nasional Pariwisata dan Kewirausahaan (SNPK)*, 2022, pp. 516–527.
- [47] M. M. B. R. Kartawinata, *Manajemen Keuangan: Sebuah Tinjauan Teori dan Praktis*. Bandung, Indonesia: Widina Bhakti Persada, 2020.

# Academia Open

Vol 10 No 2 (2025): December

DOI: 10.21070/acopen.10.2025.11755 . Article type: (Business and Economics)

[48] E. Suandi, *Hukum Pajak*. Jakarta, Indonesia: Salemba Empat, 2000.

[49] E. I. M. Parapat and E. P., “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Utara,” *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, vol. 6, no. 2, pp. 45–54, 2021.